

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang didirikan seseorang, sekelompok orang atau badan yang melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah perusahaan mempunyai visi dan misi untuk menjalankan bisnisnya menuju tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang tercerminkan dari harga saham perusahaan (Saenong, 2017). Nilai perusahaan harus dijaga agar bernilai baik dan stabil tiap tahunnya untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Menurut Qeisari dan Ahmadi (2016) nilai perusahaan adalah sebuah ukuran ekonomi yang mencerminkan nilai pasar bisnis. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan keinginan yang tinggi bagi investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Peningkatan harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Rasio Tobin's Q dapat memberikan informasi yang mampu menjelaskan berbagai fenomena kegiatan operasional perusahaan (Tambunan *et al*, 2017). Semakin tinggi nilai Tobin's Q (nilai perusahaan) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek tingkat pertumbuhan yang semakin baik. Perhitungan nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Tobin's

Q dengan formula ($total\ assets + market\ capitalization - book\ value\ of\ equity$)/ $total\ assets$ (Rashid dan Islam, 2013 dalam Bhat *et al*, 2018). Rasio Tobin's Q merupakan suatu alat pengukuran yang akurat dalam mengukur keefektifan manajemen dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Nilai suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kendali manajemen dan faktor eksternal lainnya (Asante *et al*, 2018).

Seiring dengan perkembangan jaman di era globalisasi, penerapan *corporate governance* pada seluruh aktivitas perekonomian perusahaan tidak dapat dihindari lagi. Apabila kondisi *corporate governance* dapat dicapai maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih (*clean government*) dan terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) serta tata kelola perusahaan yang baik (Effendi A, 2016:144). Kebutuhan untuk membahas *corporate governance* muncul sebagai akibat dari beberapa penipuan dan keruntuhan di sektor perusahaan (Bhat *et al*, 2018). Kasus WorldCom yaitu perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat menyatakan pailit pada 2002 setelah terbukti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Penipuan yang dilakukan CEO WorldCom Bernard Ebbers, menyebabkan perusahaan telekomunikasi yang memiliki karyawan 80.000 orang tersebut bangkrut dan aset perusahaan senilai USD103,9 miliar hilang (sindonews.com). Penyimpangan dihasilkan dari memiliki struktur *corporate governance* yang lemah, yang memunculkan kebutuhan akan reformasi untuk meningkatkan sistem tata kelola perusahaan (Arora dan Sharma, 2016). Oleh sebab itu, penerapan *corporate governance* harus dilakukan demi keberlangsungan bisnis perusahaan.

Menurut Syafitri *et al* (2018) *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti *shareholder* dan *stakeholder*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) asas *good corporate governance* yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran). Keberadaan *corporate governance* ini akan menjadi sebuah kebutuhan yang dapat menjembatani pihak investor dengan pihak manajemen perusahaan. Dalam penerapannya, *corporate governance* pasti akan menimbulkan sebuah masalah yaitu seperti terjadinya perbedaan kepentingan karena karakteristik kepemilikan saham perusahaan dan konflik antara manajer dan investor (Tambunan *et al*, 2017). Konflik tersebut sering disebut dengan konflik keagenan.

Dalam mencapai *corporate governance* yang baik, dibutuhkan peran dari kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah salah satu cara untuk meminimalisir adanya konflik keagenan dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial membuat kepentingan manajemen dan pemegang saham perusahaan sejajar (Syafitri *et al*, 2018). Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan (Effendi, 2015:59). Kepemilikan manajerial diukur dengan cara mengidentifikasi pada daftar struktur

kepemilikan adakah kepemilikan yang dimiliki oleh dewan direksi maupun dewan komisaris. Sehingga selain menjadi pengelola perusahaan, manajemen juga mempunyai peran sebagai pemegang saham yang mempunyai hak juga dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Dengan begitu peningkatan jumlah kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Selain itu, manajemen puncak yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena apabila manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan maka insentif yang akan didapatkan manajemen akan meningkat (Octavia, 2017). Hasil penelitian dari Asante *et al* (2018) bahwa terdapat pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Syafitri *et al* (2018) menghasilkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Menurut Syafitri *et al* (2018) dewan direksi adalah bagian dari manajemen puncak yang berperan sebagai agen atau pengelola yang berkedudukan bertanggung jawab secara keseluruhan atas kegiatan operasional perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi adalah salah satu variabel dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Sebagian besar penelitian yang dilakukan dibidang ini akan memperhatikan ukuran atau jumlah dewan direksi di dewan. Dari perspektif agen, dewan direksi yang lebih banyak cenderung waspada terhadap masalah agensi karena lebih banyak individu yang mengendalikan manajemen (Qeisari dan Ahmadi, 2016). Pengendalian

manajemen yang baik akan mencerminkan nilai perusahaan yang baik. Tetapi menurut Asante *et al* (2018) ukuran dewan direksi di dewan perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan.

Dalam pengelolaan perusahaan, diperlukan sebuah pengawasan agar perusahaan berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah tugas dari dewan komisaris. Dewan komisaris adalah salah satu inti dari *Corporate Governance* yang memiliki tugas menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Syafitri *et al*, 2018). Dewan komisaris harus bersikap profesional yaitu berintegritas dan mempunyai kemampuan menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan telah memperhatikan semua kepentingan pemangku jabatan lainnya. Pengawasan yang baik membuat kegiatan perusahaan akan berjalan lancar, dengan begitu nilai perusahaan dapat meningkat.

Dewan komisaris terdiri dari dewan yang berasal dari internal dan eksternal sebuah perusahaan. Dewan komisaris yang berasal dari eksternal disebut dengan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Ratnasari *et al*, 2018). Komisaris independen memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melakukan pengawasan karena berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan. Semakin baik pengawasan perusahaan, semakin

baik kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan. Daniri (2005) dalam Saenong (2017) mengatakan bahwa komposisi komisaris dalam sistem *two-tier board* dianjurkan agar didominasi para komisaris independen, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan Tambunan *et al* (2017) yaitu dewan komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan Tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Yanto (2019) menghasilkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan.

Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Susanti, 2018). Faccio (2006) dalam Kristanto (2018) menggolongkan suatu perusahaan memiliki *political connections* apabila setidaknya ada satu pemegang saham yang memiliki minimal 10% hak suara atau manajemen puncak (dewan komisaris dan dewan direksi) yang menjadi anggota parlemen, menteri, dan *top official* dan atau memiliki hubungan erat dengan politisi dan partai.

Pada negara berkembang, menyediakan sumber daya merupakan tantangan bagi perusahaan serta pemegang kendali yang kuat yaitu pemerintah adalah sebagai pihak yang mengalokasi sumber daya (Harjan, 2018). Oleh karena itu, perusahaan mulai melibatkan koneksi politik untuk menjadi layak agar mendapatkan keuntungan. Menurut Brogaard *et al* (2015) keberadaan

kekuatan politik di perusahaan membantu manajemen yang berdampak pada undang-undang dan peraturan dan memberi akses informasi ke orang dalam, yang memungkinkan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dan mengurangi ketidakpastian. Oleh karena itu, perusahaan menunjuk manajemen puncak yaitu dewan komisaris dan dewan direksi yang terlibat dengan koneksi politik. Hasil dari penelitian Maaloul *et al* (2018) menunjukkan koneksi politik memperbaiki kinerja dan nilai dari perusahaan. Tetapi, Dewanti (2019) mendapatkan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins'Q.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2018 yang mengeluarkan Laporan Tahunan secara lengkap pada tahun 2018. Seperti dalam penelitian Maaoloul (2018), lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, dan perusahaan *leasing* dikeluarkan dari sampel penelitian karena terdapat perbedaan aturan dan pengawasan lebih dari Otoritas Jasa Keuangan dibandingkan dengan perusahaan komersial dan industri. Selain itu, penelitian ini mengecualikan perusahaan *delisting* dan perusahaan yang data akuntansi dan keuangannya tidak lengkap.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan agar masalah yang diteliti mempunyai arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018.
2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2018 dan tidak *delisting*.
3. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Tahunan secara lengkap pada tahun 2018.
4. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Keuangannya dalam mata uang Rupiah.
5. Variabel yang digunakan dalam *corporate governance* adalah Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Komisaris Independen.

6. Variabel koneksi politik dilihat dengan ada tidak nya satu pemegang saham yang memiliki minimal 10% saham atau manajemen puncak (dewan komisaris dan dewan direksi) yang menjadi anggota dan atau mantan anggota parlemen, menteri, mantan anggota militer (purnawirawan polisi dan TNI) dan atau memiliki hubungan erat dengan politisi atau partai politik yang dapat dideteksi dan diketahui melalui laporan tahunan dan media massa atau berita *online*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah Koneksi Politik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis dari penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi investor

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di sebuah perusahaan.

3. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai referensi dalam mengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan bagian yang mencakup uraian singkat dan materi yang dibahas setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung dan mendasari penelitian, tinjauan pustaka, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai keadaan dan cakupan penelitian seperti: variabel penelitian, objek penelitian, penentuan populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan tentang penyajian hasil penelitian dalam bentuk tabel, perhitunagn analisis serta pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil pengamatan penelitian dan juga saran berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti dalam melakukan yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.